

## PU Ajukan Tambahan Dana *Land Capping* Rp 450 Miliar

JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengajukan tambahan dana *land capping* (kenaikan biaya pengadaan tanah) sebesar Rp 450 miliar melalui skema Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2013. Pengajuan tambahan dana ini dipicu oleh lonjakan penyerapan dana *land capping* seiring meningkatnya kegiatan pembebasan lahan.

“Dalam surat yang disampaikan Menteri Pekerjaan Umum pada 8 Mei lalu, diusulkan ada tambahan dana *land capping* sebesar Rp 450 miliar dalam APBNP 2013. Jika itu disetujui, total dana *land capping* menjadi Rp 950 miliar pada tahun ini,” kata Kepala Satuan Kerja (Satker) *Land Capping* Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Nurdin Abdul Fatah di Jakarta, Selasa (21/5).

Pemerintah telah mengalokasikan dana *land capping* sebesar Rp 500 miliar per tahun dari total anggaran sebesar Rp 4,89 triliun bagi 28 jalan tol untuk lima tahun sejak 2009. Namun dana *land capping* ternyata tidak terserap seluruhnya, yakni hingga saat ini baru sekitar Rp 1,5 triliun.

Dari alokasi dana *land capping* tahun ini, kata dia, sudah terserap sekitar Rp 55,8 miliar berdasarkan kelengkapan dokumen dari empat ruas tol. Rinciannya adalah penyerapan dana tol Surabaya-Mojokerto sebesar Rp 33,6 miliar, tol Semarang-Solo Rp 12,3 miliar, tol Bogor Ring Road Rp 6,8 miliar, dan tol

Pejagan-Pemalang Rp 3,8 miliar.

“Sebenarnya dana yang sudah terserap sekitar Rp 188 miliar dari Rp 500 miliar. Namun, proses itu masih membutuhkan kelengkapan dokumen administrasi, seperti surat pelepasan hak atas tanah dan lainnya,” jelas dia.

Salah satu ruas tol yang membutuhkan kelengkapan dokumen administrasi adalah tol Semarang-Solo seksi II Ungaran-Bawen. Dari alokasi dana *land capping* sekitar Rp 225 miliar untuk seksi tersebut, badan usaha jalan tol itu justru sudah mengeluarkan dana Rp 240 miliar. Pemerintah bisa membayar seluruh alokasi dana *land capping* tersebut, asalkan disertai kelengkapan dokumen.

“Kami hanya bisa membayar sesuai alokasi dana yang tersedia. Untuk kelebihannya perlu dilakukan amandemen PPJT baru,” lanjut dia.

Nurdin menuturkan, penyerapan dana *land capping* tahun ini diperkirakan naik dan melebihi alokasi anggaran yang disediakan. Hal itu dikarenakan proses pengadaan lahan sejumlah ruas tol mulai digencarkan lagi. Ruas tol itu di antaranya Ciawi-Sukabumi, Cinere-Jagorawi, dan tol Mojokerto-Kertosono.

“Bahkan, kabarnya akan ada lonjakan bila tol Depok-Antasari mengajukan dana *land capping*,” imbuh dia.

Tersisa Rp 100 Miliar

Dihubungi terpisah, Tri Agus Rianto, direktur utama PT Citra Waspphu-

towa (pemegang konsensi tol Depok-Antasari) mengungkapkan, pihaknya belum mengajukan dana *land capping* kepada pemerintah. Hal itu karena dana pembebasan lahan melalui pembiayaan dari Badan Layanan Umum Badan Pengatur Jalan Tol (BLU BPJT) sebesar Rp 580 miliar belum terserap seluruhnya. Dana BLU BPJT masih tersisa Rp 100 miliar dan diperkirakan bisa terserap pada akhir bulan ini.

“Sambil menunggu dana itu terserap seluruhnya, kami juga siapkan dokumen-dokumen untuk pengajuan dana *land capping* kepada pemerintah. Namun, besaran dana yang diajukan bergantung ketersediaan pemerintah,” ungkap dia.

Sebelumnya, perusahaan menaikkan pinjaman dana pembebasan lahan dari BLU BPJT menjadi Rp 580 miliar dari sebelumnya Rp 378 miliar. Dana ini untuk membebaskan lahan dari Depok hingga Sawangan. Setelah itu, perusahaan segera melaksanakan konstruksi, dan kemudian akan meneruskan pembebasan tanah hingga wilayah Krukut.

Setelah total dana BLU yang dialokasikan sebesar Rp 770 miliar terpakai semua, pemilik konsesi jalan tol akan menggelontorkan dana untuk pembangunan tol senilai Rp 3,9 triliun. Untuk modal awal, perusahaan siap menyetorkan sekitar Rp 1 triliun untuk biaya sewa kantor, desain, dan konsultan. (ean)